



10

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 10.13/RIS/V/2026

Senin, 18 Mei 2026

**Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai : 14.00 WIB
Waktu Selesai : 15.00 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.
-

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI SENIN, TANGGAL 18, BULAN MEI, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 31 orang dari 39 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 18 Mei 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda Rapat Paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna hari Jumat 8 Mei 2026 yang lalu.

Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampiannya, dimulai dari

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Sigit Nurcahyo, SH Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Muadz A.A., SE., ME Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munazar, MPsi Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Mohammad Sofyan, ST Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Sigit Nurcahyo, SH Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Sigit Nurcahyo, SH yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Gerindra Kepada Saudara Krisnadi Setyawan disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Gerindra --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.



Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kepada Saudara Muadz A.A., SE., ME disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Muadz A.A., SE., ME yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Kepada Saudara Munazar, M.Psi disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munazar, M.Psi yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi PAN Kepada Saudara Mohammad Sofyan, ST disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Mohammad Sofyan, ST yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi PPP Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Kepada Saudara Choliq Nugroho Adji disilakan.

-- Pemandangan Umum Fraksi Nasdem --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing.

Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Mei 2026 pukul 13.00 WIB. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.



Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup. **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Pembawa Acara :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@iogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.iogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.00 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 31 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 :
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Sigit Nurcahyo, SH Urutan ke- 1
 - b. Fraksi Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke- 2
 - c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Muadz A.A., SE., ME Urutan ke- 3
 - d. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munazar, M.Psi Urutan ke- 4
 - e. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Mohammad Sofyan, ST Urutan ke- 5

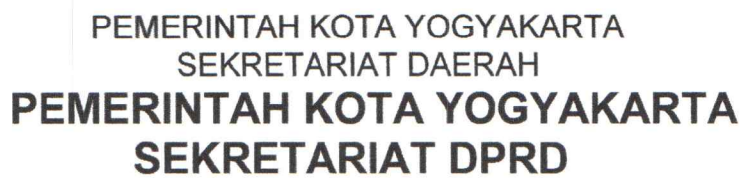
- f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn Urutan ke- 6
- g. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji Urutan ke- 7
- 3. Rapat Paripurna Jawaban atas PU Fraksi terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 akan diagendakan pada hari
Senin tanggal 25 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.
- 4. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Mei 2026
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna
Acara	: • Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Deni Sugiono		Sekretariat daerah	1.	
2.	Yuniarto		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kadri. R.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Deni Rasyid		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Harlo yub		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.	Hay		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.			Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Bihari Iq		Bagian Hukum	10.	
11.	Hilmi		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.	Encahi Sahr		Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	BAYU SIWI		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Dwicanto		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Rizyanti		Bagian Organisasi	15.	
16.	Anggi		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Joko		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦕꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KotaYogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fibi Parlina fi-		Inspektorat	1.	
2.	Redho		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Hari x		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Dina Vika M	IV	BKPSDM	4.	
5.	Widyan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.	Budi Prana		BPBD	6.	
7.	Pansunu Perwitasari	V	RSUD	7.	
8.	Dzani		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	Anhammadin		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.			BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.	Anggoro S		PD Jogjatama Vishesha	11.	
12.			RS Pratama	12.	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦼꦱꦼꦂꦠꦶꦂꦠꦤꦼꦫꦏꦺꦴꦕꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KotaYogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bumkang P		Kemantren Danurejan	1.	
2.	Luk.		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Syanip M		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Cahaya W		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Horis		Kemantren Jetis	5.	
6.	Komaru		Kemantren Kotagede	6.	
7.	Pranagard.		Kemantren Kraton	7.	
8.	Gunnung M		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	Scerita		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	Curto		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	SAPZEMK		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Ent T		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Aras		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Dura		Kemantren Wirobrajan	14.	

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**



PDI PERJUANGAN

Paripurna, 18 Mei 2026

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah dan segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhana Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum atas : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas peningkatan efisiensi anggaran serta penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2025 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kedepannya agar hal seperti ini tetap dapat dipertahankan.

2. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa untuk pengelolaan APBD ini harus kredibel dan berdampak ke publik secara nyata. APBD harus sesuai dengan kebutuhan dan alokasinya kepada rakyat, sehingga efektifitas program diukur dengan orientasi kerja demi kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Terkait dengan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat trobosan baru agar peningkatan kontribusi terhadap APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan UMKM binaan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Bertolak dari beberapa hal-hal yang kami uraikan diatas, serta mencermati tahapan-tahapan pembicaraan laporan panitia khusus raperda pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi PDI Perjuangan Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan.

Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Yogyakarta

Ketua

Darini, S.IP



Sekretaris

Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/Tanggal: Senin/18 Mei 2026

Atas

**Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Secara umum, capaian realisasi pendapatan sebesar 103,05% dan realisasi belanja sebesar 92,02% menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang sehat. Namun, fraksi kami ingin memberikan sejumlah catatan strategis, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kami pandang sebagai fondasi kemandirian fiskal Kota Yogyakarta ke depan.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

1. Peningkatan PAD Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Besar

Realisasi PAD tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.021.939.753.077,07 dan memberikan kontribusi sebesar 49,10% terhadap total pendapatan daerah. Artinya, Kota Yogyakarta masih sangat bergantung pada dana transfer (50,90%). Fraksi GERINDRA berpandangan, angka kontribusi 49,10% ini perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Kemandirian daerah harus menjadi prioritas, tidak hanya mengandalkan belanja modal yang dibiayai transfer, tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang luar biasa besar.

2. Dominasi Pajak Daerah dan Implikasinya

Kami mencatat kontribusi terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar 69,23% atau Rp707,5 miliar, terutama dari PBJT Makanan/Minuman. Meskipun realisasinya melampaui target (107,69%), dominasi pajak konsumsi ini memiliki risiko volatilitas ekonomi. Kami mendorong Pemerintah Kota untuk memperluas basis pajak tanpa membebani Masyarakat.

3. Catatan Kritis: Kontribusi BUMD yang Minim dan Perlunya Transformasi Pengelolaan

Hal yang juga perlu menjadi fokus adalah kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD yang hanya sebesar 3,63% atau sekitar Rp37,14 miliar. Angka ini merupakan kontribusi terendah dibanding komponen PAD lainnya.

Kontribusi yang masih terbilang kecil ini berasal dari distribusi keuntungan usaha (dividen) dari PDAM Tirtamarta, BPR Bank Jogja, PT Bank Pembangunan Daerah DIY, dan BUKP. Rendahnya kontribusi ini merupakan alarm bagi kita semua.

Oleh karena itu, fraksi GERINDRA memandang bahwa harus ada upaya perbaikan pengelolaan BUMD secara fundamental. BUMD seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai *profit center* yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penutup

Secara keseluruhan, fraksi GERINDRA meyetujui rancangan Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan catatan bahwa catatan kritis kami tentang PAD, khususnya transformasi BUMD, harus menjadi bahan evaluasi serius dan direncanakan aksinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang.

Demikian pandangan umum fraksi kami. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam mengabdikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Senin, 18 Mei 2026

Hormat Kami,

Ketua

Dhian Novitasari, M.Pd

**FRAKSI GERINDRA
DPRD**



Sekretaris

Ririk Banowati Permanasari, SH

Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD, Kepala BUMD, dan Staf Ahli Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.**

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Yogyakarta telah mencermati Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Yogyakarta yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut tentu merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

Namun demikian, Fraksi PKS berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, penanganan persoalan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan Wali Kota, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan, kritik, dan masukan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Belanja Daerah Masih Perlu Ditingkatkan

Fraksi PKS mencermati bahwa realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,002 triliun atau hanya mencapai 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan. Artinya masih terdapat sisa belanja yang cukup besar dan menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal.

Fraksi PKS menilai bahwa rendahnya serapan belanja harus menjadi evaluasi serius, terutama pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota perlu menjelaskan secara rinci:

- Program apa saja yang tidak terlaksana secara optimal;
- Faktor utama rendahnya penyerapan anggaran;
- OPD mana yang memiliki tingkat serapan rendah;
- Dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat;
- Langkah konkret perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi PKS berpandangan bahwa APBD harus mampu bergerak lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Rendahnya penyerapan belanja berpotensi menurunkan efektivitas pembangunan dan menghambat perputaran ekonomi daerah.

2. Tingginya SILPA Perlu Menjadi Evaluasi Bersama

Fraksi PKS mencermati adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp235,3 miliar. Nilai SILPA yang cukup besar ini menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Di satu sisi, SILPA dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Namun di sisi lain, Fraksi PKS menilai bahwa tingginya SILPA juga menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dijawab melalui APBD.

Ke depan, Fraksi PKS mendorong agar APBD lebih adaptif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara lebih maksimal.

3. Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Masih Tinggi

Fraksi PKS mencatat bahwa Pendapatan Transfer masih memberikan kontribusi sebesar 50,90 persen terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih cukup bergantung pada pemerintah pusat.

Walaupun Pendapatan Asli Daerah telah mencapai lebih dari Rp1 triliun, Fraksi PKS memandang Pemerintah Kota perlu terus melakukan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui:

- Optimalisasi potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat kecil;
- Digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi;
- Penataan aset daerah agar lebih produktif;
- Penguatan BUMD agar lebih profesional dan berkontribusi signifikan terhadap PAD;
- Pengembangan sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata berkualitas.

Fraksi PKS juga mengingatkan agar orientasi peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar target angka, tetapi tetap mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

4. Kualitas Belanja Harus Lebih Berorientasi Pada Dampak

Fraksi PKS menilai bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya pendapatan atau besarnya serapan anggaran semata, tetapi sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi PKS menilai bahwa tantangan Kota Yogyakarta ke depan semakin kompleks, sehingga APBD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan fundamental masyarakat.

5. Pengelolaan Aset Daerah Harus Lebih Optimal

Fraksi PKS mencermati bahwa nilai aset Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai lebih dari Rp6 triliun. Nilai aset yang besar tersebut harus dibarengi dengan tata kelola aset yang profesional, transparan, dan produktif. Fraksi PKS berpandangan bahwa aset daerah jangan sampai hanya menjadi angka dalam neraca, tetapi harus menjadi instrumen penguatan pelayanan publik dan pendapatan daerah.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Harus Diperkuat

Fraksi PKS mengapresiasi capaian tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, Fraksi PKS tetap mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan APBD. Fraksi PKS berpandangan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Yogyakarta pada prinsipnya menerima untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai catatan kritis yang kami sampaikan, Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjadikan evaluasi APBD ini sebagai momentum memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



PKS
DPRD KOTA YOGYAKARTA
Sekretaris

Raja Kurniawan, S.IP.



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2026
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Bambang Seno Baskoro, S.T

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025 pada paripurna yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya serapan anggaran secara efektif yang didasarkan pada perencanaan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang di asumsikan secara terukur selama kurun waktu 1 tahun.

Secara yuridis formal, Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025 mengacu pada Standar Akutansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Dengan demikian, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang direncanakan untuk pengoptimalkan pencapaian beberapa target pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, dengan fokus prioritas tetap pada pemulihan dan pembangunan ekonomi, melalui proses perubahan anggaran diperlukan pencermatan kembali

terhadap pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah sehingga diharapkan terdapat ruang untuk membangun pondasi pemulihan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 (lima) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan APBD didasarkan pada; (1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3). Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun lalu yang harus digunakan pada tahun berjalan; (4). Keadaan Darurat; dan (5). Keadaan Luar Biasa.

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dari Saudara Penjabat Walikota , maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Permasalahan Perhubungan di Kota Yogyakarta berpusat pada tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, minimnya minat beralih ke transportasi umum; kesemrawutan parkir, dan konflik tata ruang akibat masifnya lonjakan wisatawan, seperti : Kemacetan Lalu Lintas, Lemahnya Daya Tarik Transportasi Umum,

Masalah Perparkiran, Hambatan Tata Ruang dan Infrastruktur.
Membutuhkan upaya :

- a. **Manajemen Rekayasa Lalu Lintas:** Penerapan sistem satu arah (one way), buka-tutup jalan, dan larangan belok di titik-titik persimpangan kritis.
 - b. **Optimalisasi Angkutan Umum:** Pengembangan layanan Trans Jogja dan penyediaan fasilitas bus sekolah untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
 - c. **Penertiban Parkir:** Penegakan hukum yang tegas terhadap juru parkir nakal dan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan.
2. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Yogyakarta saat ini berpusat pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), pelanggaran jam operasional dan tata krama indekos, serta vandalisme.
- a. **Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL):** Pelanggaran aturan zonasi perdagangan di kawasan pedestrian, khususnya penertiban PKL liar di area terlarang seperti kawasan Malioboro.
 - b. **Pengelolaan dan Pembuangan Sampah:** Masih maraknya aktivitas warga atau wisatawan yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan, yang berdampak pada kebersihan lingkungan dan estetika kota.
 - c. **Operasional Tempat Usaha dan Indekos:** Pelanggaran batas jam operasional kafe/warung makan hingga larut malam serta pelanggaran jam berkunjung bagi tamu indekos yang mengganggu ketenangan warga sekitar.
 - d. **Pemasangan Reklame Liar:** Maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan reklame tidak berizin yang merusak tata ruang dan estetika kota.
 - e. **Kejahatan Jalanan & Vandalisme:** Tindakan kriminalitas jalanan dan aksi corat-corek yang merusak fasilitas umum.

3. Permasalahan perlindungan anak di Kota Yogyakarta didominasi oleh maraknya kasus kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, yang terjadi di lingkungan pendidikan dan tempat pengasuhan, seperti kasus kekerasan di tempat penitipan anak (daycare) yang melibatkan puluhan korban.

a. **Kekerasan di Lembaga Pengasuhan dan Pendidikan:** Kasus kekerasan di daycare (penitipan anak) serta kekerasan seksual oleh oknum pendidik di sekolah menjadi sorotan utama. Hal ini memicu kecaman nasional karena melanggar hak tumbuh kembang anak.

b. **Kekerasan Berbasis Online (Siber):** Kerentanan anak terhadap eksploitasi dan cyberbullying meningkat akibat pengawasan orang tua yang kurang terhadap penggunaan gawai dan akses internet sehari-hari.

c. **Pola Asuh dan Faktor Ekonomi Keluarga:** Tekanan ekonomi dan ketidaktahuan orang tua terkait pola asuh yang ramah anak menjadi akar masalah yang sering memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.

4. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kota Yogyakarta sering menghadapi kendala seperti gagal lelang, keterlambatan pelaksanaan, perencanaan yang kurang matang, hingga potensi persaingan tidak sehat. Tantangan ini berdampak langsung pada lambatnya penyerapan anggaran dan kualitas infrastruktur publik di wilayah.

a. **Perencanaan yang Kurang Matang:** Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan dengan kondisi riil di lapangan sering kali memicu perubahan desain dan adendum, yang berujung pada keterlambatan proyek.

b. **Gagal Lelang:** Faktor seperti spesifikasi yang kaku, kurangnya peminat (vendor) yang memenuhi kualifikasi, atau tidak adanya penawaran yang sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kerap menyebabkan tender harus diulang.

- c. **Keterlambatan dan Putus Kontrak:** Masalah klasik dalam pengadaan konstruksi. Adanya keterlambatan pengerjaan dari pihak penyedia sering mengakibatkan putus kontrak, mangkraknya pekerjaan, atau pengenaan denda.
 - d. **Potensi Praktik Monopoli dan Nepotisme:** Pengawasan yang kurang optimal terkadang memicu praktik persekongkolan tender atau monopoli oleh rekanan tertentu, yang membatasi peluang bagi penyedia jasa lokal lainnya.
 - e. **Transparansi dan Pengawasan:** Desakan dari berbagai elemen masyarakat, seperti pegiat antikorupsi di Jogja, menuntut agar PBJ lebih terbuka dan akuntabel untuk mencegah penyimpangan anggaran.
5. Permasalahan utama pertanian di Kota Yogyakarta adalah penyempitan lahan akibat alih fungsi menjadi permukiman dan area komersial, keterbatasan regenerasi petani muda, serta tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
- a. **Penyusutan Lahan yang Masif:** Luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta terus menyusut drastis, sehingga menyisakan sekitar 50 hektar saja. Pertumbuhan jumlah penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan menyebabkan tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan ruang usaha.
 - b. **Krisis Regenerasi Petani:** Mayoritas petani yang menggarap lahan di dalam maupun pinggiran kota didominasi oleh kelompok usia tua. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian berdampak pada keberlanjutan regenerasi petani.
 - c. **Keterbatasan Pasokan Pangan Lokal:** Berkurangnya lahan pertanian secara langsung menurunkan produksi pangan lokal (khususnya sayuran). Hal ini membuat Kota Yogyakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari kabupaten tetangga (Sleman, Bantul, dll).

- d. **Infrastruktur dan Sumber Daya:** Keterbatasan akses air bersih/irigasi yang layak, degradasi kualitas tanah perkotaan, dan fluktuasi harga sarana produksi seperti pupuk menjadi tantangan operasional harian bagi para pelaku pertanian.
- e. **Keterbatasan Penyuluh Pertanian:** Kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempersulit pendampingan optimal bagi para pelaku usaha tani perkotaan.
6. Terkait dengan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, opini laporan Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan **wajar** dalam semua hal yang material, tentunya perlu mendapat apresiasi namun tidak lupa perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan berupaya terus meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap program kegiatan.

Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

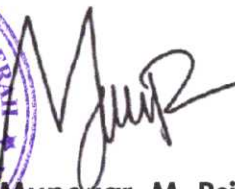
KETUA,



Muhammad Affan, S.I.P., S.H.



SEKRETARIS,



Munazar, M. Psi.



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta,

**Pada Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2026
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Saudara Sekretaris Daerah serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta;

Tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini yang terkandung dalam APBD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025, maka **Fraksi PAN mengapresiasi** kinerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang mendapat pengakuan dari BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke tujuh belas kalinya, **namun secara umum F - PAN berharap Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memastikan melaksanakan rekomendasi BPK:**

- Pengelolaan Pendapatan: Perlunya akurasi data wajib pajak dan minimalisasi potensi kebocoran pada sistem retribusi digital.
- Ketepatan Belanja: Memastikan belanja modal benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah dasar warga, bukan sekadar proyek "kejar tayang" di akhir tahun.
- Manajemen Aset: Penataan aset daerah yang masih menjadi temuan berulang, terutama terkait aset tetap yang dikuasai pihak ketiga atau aset yang tidak didukung bukti kepemilikan sah.

Beberapa catatan dari F- PAN terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Aspirasi Terhadap Performa BUMD BUMD Kota Yogyakarta, termasuk PDAM Tirtamarta dan Bank Jogja, memberikan kontribusi sebesar 3,63% terhadap PAD. Meskipun secara nominal mencapai puluhan miliar rupiah, F- PAN mencatat bahwa kontribusi ini masih dapat dioptimalkan. kinerja BUMD yang dinilai belum "sehat" secara bisnis di tengah persaingan jasa keuangan dan kebutuhan air bersih yang meningkat. Penyertaan modal sebesar Rp 44 miliar pada tahun 2025 seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, bukan hanya sekadar untuk memenuhi rasio kecukupan modal perbankan.

Masyarakat berharap PDAM Tirtamarta mampu memberikan solusi atas kelangkaan air tanah di wilayah pemukiman padat, sementara Bank Jogja didorong untuk lebih agresif dalam memberikan kredit lunak kepada pedagang pasar tradisional yang terdampak penurunan daya beli. Hal ini selaras dengan visi "kemaslahatan umum" .

Khususnya retribusi Parkir mestinya menjadi potensi PAD. diperlukan peningkatan pengawasan dan penerbitan agar pemasukan retribusi lebih maksimal ,**kinerja instansi harus meningkat karena pada kenyataan pada waktu – waktu tertentu terjadi boming kunjungan wisata ke Yogyakarta .**

2. Krisis Pengelolaan Sampah:

F-PAN menangkap suara Masyarakat yang paling mendominasi diskursus publik di Yogyakarta sepanjang tahun 2025 adalah kegawat daruratan pengelolaan sampah. Pasca-penutupan TPST Piyungan, kebijakan desentralisasi sampah yang dibebankan kepada pemerintah kota dinilai oleh masyarakat sebagai langkah yang belum didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Analisis

Krisis Sampah Berdasarkan Temuan Ombudsman RI DIY Ombudsman RI Perwakilan DIY menyampaikan Laporan Hasil Kajian (LHK) yang menyimpulkan adanya "jurang kebijakan" (policy gap) antara cita-cita ideal kemandirian sampah dan realitas kapasitas di lapangan. Beberapa poin kritis yang disampaikan masyarakat meliputi:

- Ketidaksiapan Lahan: Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan ekstrem untuk membangun TPST atau Unit Pengolahan Sampah (UPS) mandiri, sementara usulan pembelian lahan di luar kota belum terealisasi secara konkret.
- Paradoks PSEL: Fokus pemerintah pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang mahal dikritik karena membutuhkan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari, yang justru kontraproduktif dengan semangat pengurangan sampah dari hulu (3R). Penundaan proyek PSEL hingga 2028 membuat nasib pengelolaan sampah di tingkat kota menjadi "abu-abu" dan berisiko memicu darurat sampah berulang.
- Tumpukan Sampah di Depo: Meskipun pemerintah menjanjikan skema "Sampah Segar", kenyataannya tumpukan sampah ribuan ton masih mengendap di depo-depo, memicu aroma tidak sedap dan protes warga melalui pemasangan spanduk-spanduk kritis di lokasi-lokasi strategis.
- masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak agar Pemerintah Kota Yogyakarta berhenti berwacana idealis dan mulai melakukan aksi riil melalui penggunaan teknologi pemusnahan sampah yang lebih terdesentralisasi, murah, dan tersebar di tingkat komunitas, serta memperkuat penegakan aturan (law enforcement) terhadap produsen sampah plastik.

3. SILPA

:F-PAN menyampaikan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 235.3 M merupakan angka yang masih cukup besar, bisa diartikan bahwa **pemerintah daerah**

- menunjukkan perencanaan belum optimal.
- Perlu evaluasi penganggaran dan pelaksanaan program.
- APBD harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Sektor Pendidikan

F – PAN mengingatkan bidang Pendidikan, Pemkot dimohon untuk selalu meningkatkan anggaran Bosda, JPD untuk siswa SD, SMP maupun sekolah PAUD **mengingat pendanaan merupakan salah satu kunci sukses pengembangan kualitas Pendidikan**. Sektor pendidikan, khususnya ketersediaan sekolah dan fasilitas rumah belajar modern, menjadi poin penting dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia di Yogyakarta.

5. Penanganan kemiskinan

Penanganan Kemiskinan F- PAN mencermati terkait penanganan kemiskinan yang harus berbasis data akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. mendorong agar APBD 2025 benar-benar difokuskan pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah, terutama di daerah-daerah padat

F-PAN melihat Angka kemiskinan dalam data statistik di Kota Yogyakarta 6,26 % di tahun 2024 menjadi 6,14 % di tahun 2025 atau penduduk miskin kira - kira 28.580 memang turun namun masih kecil, maka penguatan peran TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting, fakta dilapangan masih banyak aduan/permintaan **KSJPS** oleh masyarakat untuk **keperluan pendidikan** berdasarkan laporan dari Warga ke Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta, termasuk juga laju inflasi yang kadang naik tinggi mempengaruhi harga kebutuhan pokok Masyarakat Kota Yogyakarta,

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang secara spesifik menargetkan kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan, dengan mempertimbangkan biaya hidup yang lebih tinggi dan tantangan pekerjaan di lingkungan perkotaan. Program jaminan sosial perlu diperkuat untuk memastikan cakupan kesehatan yang komprehensif dan meminimalkan pengeluaran pribadi untuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota.

Rekomendasi F - PAN

1. Pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi antara "angka administratif" dan "realitas sosial". Keberhasilan melampaui target pendapatan (103%) dan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap jeritan sektor pariwisata yang sedang kesulitan dan masyarakat yang terhimpit krisis sampah.
2. penanganan sampah harus digeser dari pendekatan proyek mercusuar (PSEL) menuju pendekatan aksi cepat yang terdesentralisasi. Pengalokasian SiLPA untuk pembebasan lahan TPST mandiri atau UPS berskala kelurahan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai kebuntuan pengelolaan sampah.
3. penguatan akuntabilitas kualitas (outcome) di atas kuantitas (output). Setiap OPD harus mampu membuktikan bahwa belanja yang mereka lakukan tidak hanya "habis terserap", tetapi memberikan dampak nyata pada penurunan kemiskinan, perbaikan drainase, dan kualitas pendidikan.
4. Penataan aset tetap harus dituntaskan secara tuntas. Pengurangan ekuitas sebesar Rp. 47 Miliar harus dijelaskan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai hilangnya aset daerah. Digitalisasi manajemen aset yang terintegrasi dengan peta tata ruang kota menjadi kunci utama.
5. Perlindungan terhadap daya beli masyarakat melalui kebijakan pajak yang bijak. Di satu sisi daerah butuh PAD, namun di sisi lain pelaku usaha (hotel/restoran) butuh ruang untuk bertahan hidup. Kebijakan relaksasi pajak yang selektif dan penertiban akomodasi ilegal merupakan langkah moderat yang harus segera diimplementasikan.

Akhirnya kami mohon maaf, apabila dalam kami menyampaikan pemandangan umum ini ada hal - hal yang kurang berkenan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**



MOHAMMAD SOFYAN, S.T.

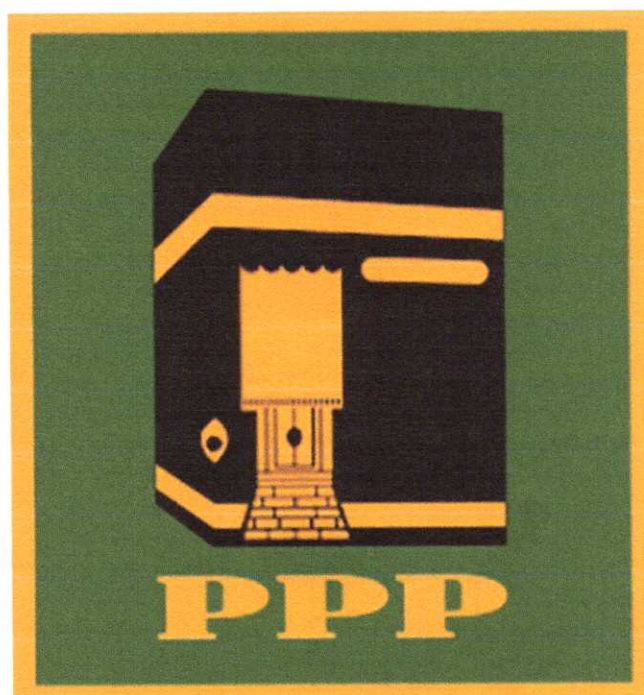
KETUA



INDARUWANTO EKO CAHYONO, S.H.

SEKRETARIS

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2026**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
18 MEI 2026
PANDANGAN UMUM**

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
PENJELASAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TANUN ANGGARAN 2025

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Senin, 18 Mei 2026

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan
Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami
hormati.
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota

Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama mencermati dan memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bapak Walikota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memberikan apresiasi atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini. Dokumen ini merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari pentingnya APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Setelah mencermati secara seksama dokumen yang disampaikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan beberapa pandangan umum dan masukan konstruktif sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah:

Kami mencatat realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.081.263.827.217,07 (dua triliun delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah tujuh sen) atau mencapai 103,42% dari anggaran.

Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Namun demikian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus menggali potensi pendapatan daerah lainnya secara inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.

Kami juga menyoroti kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya yang telah terealisasi menjadi sebesar Rp 1.021.939.753.077 (satu triliun dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh sen) atau sebesar 107,33% dari anggaran.

Kontribusi terbesar PAD masih didominasi oleh Pajak Daerah, terutama Pajak Hotel/PBJT-Jasa Perhotelan, Pajak Restoran/PBJT-Makanan dan/atau Minuman, dan Pajak Penerangan Jalan/PBJT-Tenaga Listrik.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong diversifikasi sumber-sumber PAD agar Kota Yogyakarta tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi. Optimalisasi retribusi daerah juga perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan kualitas pelayanan publik.

2. Realisasi Belanja Daerah:

Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp2.002.562.028.984,52 (dua triliun dua miliar lima ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen) atau 92,02% dari anggaran.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan belanja daerah. Penyerapan anggaran yang optimal dan tepat sasaran akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Kami juga mencermati adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 200.661.254.733,01 (dua ratus miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sat sen)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap sisa lebih ini dapat dialokasikan secara Prioritas pada program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah:

Fraksi P3 mengapresiasi adanya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang berkaitan dengan material, posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan adanya realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah.

Opini ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, kami mengingatkan agar rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Ekuitas dan Aset Daerah:

Kami mencatat peningkatan nilai Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp. 6.017.319.241.538,11 (enam triliun tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah sebelas sen)

Pengelolaan aset daerah yang baik dan optimal juga menjadi perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3). Kami mendorong

Pemerintah Kota untuk terus melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Berdasarkan pandangan umum di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan beberapa masukan konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang:

a) Penguatan Sektor UMKM:

Mengingat kontribusi signifikan sektor UMKM terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, Fraksi P3 mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, termasuk akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.

b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur dasar.

c) Fokus pada Program Prioritas :

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk lebih fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk mencapai target-target pembangunan.

d) Transparansi dan Partisipasi Publik :

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD.

Demikian pandangan umum dan masukan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota dan seluruh anggota dewan dalam menetapkan peraturan daerah yang akan menjadi landasan penting bagi pembangunan Kota Yogyakarta yang lebih baik dan berkeadilan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Terima kasih.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
18 Mei 2026**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan minggu lalu.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

APBD harus pro rakyat, yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Waktu yang tepat tahapan evaluasi dilaksanakan adalah ketika anggaran sudah diperbelanjakannya. Laporan pertanggungjawaban pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran harus dilaksanakan setiap akhir tahun yang merupakan perwujudan dari kewajiban Undang-undang. Selanjutnya ada mekanisme yang harus dijalankan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Menanggapi Nota Pengantar Walikota Yogyakarta Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Yogyakarta. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sudah melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan tahapan sesuai prosedur yang ada, yaitu melakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, Posisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2025 dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Kami mengapresiasi hasil audit sudah sesuai standar aturan pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam hasil pemeriksaan Nomor **20A/T/LHP/DJPN-V.YOG/PPD.01/03/2026 tanggal 30 Maret 2026** bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

perolehan PAD tahun 2025 melebihi target dari yang telah direncanakan, dan juga adanya peningkatan PAD dari tahun sebelumnya, dimana PAD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 855.100.858.914,30 (delapan ratus lima puluh lima miliar seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen).

6. Pendapatan Asli Daerah tersebut telah memberikan kontribusi sebanyak 49,10% terhadap pendapatan daerah. Namun, tetap perlu adanya peningkatan ke depannya hingga kontribusi PAD bisa menyentuh angka 50% ke atas dari Pendapatan Daerah, meskipun Tahun Anggaran 2025 telah berhasil mencapai **Satu Triliun** sebagaimana yang terus Kami gaungkan beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem mendorong Pemkot Yogyakarta tetap mempertahankan PAD **Satu Triliun** bahkan terus ada peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya.
7. Kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap realisasi PAD sektor pajak sebesar Rp.707.516.132.863,00 (tujuh ratus tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 107,69% dari target. Sehingga realisasi Pajak Daerah tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, yaitu sebesar 69,23%. Namun, Kami tetap memberikan catatan pendapatan pada sektor ini harus terus dimaksimalkan, seiring meningkatnya pembangunan hotel, tempat hiburan, restoran, dan penginapan di Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

8. Realisasi sektor Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 memperoleh sebesar Rp. 79.608.928.487,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 106,01% dari target. Kami memberikan masukan agar Pemkot Yogyakarta bisa meningkatkan PAD dari sektor retribusi, melihat banyaknya potensi Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan retribusi. Namun, kami tetap memberikan apresiasi karena mayoritas sektor retribusi daerah melebihi target.
9. Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 37.141.086.027,90 (tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) atau sebesar 99,92% dari target. Kami memberikan masukan pada sektor ini agar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah bisa ditingkatkan lagi manajemen pengelolaannya, bisa melalui mempersiapkan SDM yang berkualitas, transparansi keuangan dan sistem pengelolaan sehingga masyarakat bisa mendapatkan ruang partisipasi dalam pengawasan Perusahaan daerah. Jika semua ini bisa dijalankan secara maksimal maka langkah srategis ini bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan seluruh hadirin yang terhormat.

10. Sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 197.673.605.699,17 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima ribu enam

ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) atau sebesar 108,05% dari target. Sektor ini bisa memberikan hingga 19,34% pada PAD tahun anggaran 2025. Kami Fraksi Partai NasDem menghimbau ke depan agar Pemkot Yogyakarta memaksimalkan pengawasan terhadap instansi-instansi terkait untuk sumbangsi Sumber Lain-lain yang Sah berkontribusi terhadap APBD 2026 bisa ditingkatkan lagi.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

11. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 44.043.332.000,00 (empat puluh empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kami Fraksi Partai NasDem mengusulkan pada Pemkot Yogyakarta besaran penyertaan modal untuk terus ditingkatkan dengan melihat kondisi lapangan, namun harus diikuti pengawasan yang maksimal sehingga distribusi keuangan tersebut secara merata, selanjutnya banyak membuka peluang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Restorasi Indonesia.

Kota Yogyakarta, 18 Mei 2026

**Fraksi Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



Sigit Wicaksono, S. Kom

Sekretaris



Oleg Yohan

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026

10



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID